



## **BAB VIII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

Sesuai dengan PMDN Nomor 86 Tahun 2017, Indikator kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum dibagi dalam tiga aspek, yaitu:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 45 indikator ;
2. Aspek Daya saing Daerah sebanyak 10 indikator ;
3. Aspek Pelayanan Umum sesuai dengan masing –masing urusan ;

Indikator Kinerja Daerah ini kemudian dituangkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk matriks yang akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan daerah.

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcomes* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcomes*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Indikator utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut, merupakan agregasi dan akumulasi capaian kinerja dari indikator kinerja program yang bersifat *outcomes* yang dilaksanakan OPD. Selanjutnya indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan OPD merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau



lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (*outputs*) yang dilaksanakan OPD.

Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *Specific*, *Measurable*, *Achievable*, *Relevant*, *Time bond* dan *Continuously improve (SMART-C)*.

Perumusan indikator kinerja utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga yang menggambarkan tingkat keberhasilan kinerja daerah diukur dengan indikator-indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan wajib, Indikator Kinerja Kunci (IKK), Indikator kinerja lainnya yang digunakan Pemerintah Daerah yang diintegrasikan dalam rumusan makro yang terukur dan kuantitatif untuk memudahkan pengendalian, evaluasi serta laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Rumusan Indikator Kinerja Utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga disesuaikan dengan permasalahan yang dihadapi daerah dan isu-isu strategis daerah sebagai faktor penentu keberhasilan kinerja daerah. Sedangkan rumusan indikator kinerja program OPD disesuaikan dengan arah kebijakan untuk mencapai indikator kinerja utama Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga dan pelayanan yang harus dilaksanakan OPD.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2021–2026 yang telah direncanakan, dimana tahun 2020 merupakan tahun dasar, tahun 2021 merupakan tahun transisi dan indikatornya masih angka proyeksi, tahun 2022 merupakan tahun pertama RPJ MD dan tahun 2026 merupakan tahun ke lima RPJ MD. Indikator-indikator kinerja tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini.



**Tabel 8.3**  
**Penyelarasan Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Utara dan Nasional dalam RPJ MD Kota Sibolga**  
**Sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 050/3499/SJ dan Nomor 3 Tahun 2021**

No	Indikator Pembangunan	Satuan	RPJMN Tahun 2020 -2024					RPJMD Provsu Tahun 2019 -2023					RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021 -2026					
			2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3	4,5 - 5,5	5,4 - 6	5,5 - 6,3	5,5 - 6,5	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	2,74	3,00	4,00	5,20	5,55	5,90
2	Tingkat Kemiskinan	Persen					6 - 7	8,87	8,43	8,04	7,7	7,39	11,90	11,00	10,00	9,80	9,50	9,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen					3,6 - 4,3	5,5	5,45	5,4	5,35	5,3	7,75	7,50	7,25	7,00	6,75	6,50
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks					75,54	71,35	71,67	72,22	72,77	73,32	73,80	73,85	73,90	74,94	75,00	75,08
5	Rasio Gini	Rasio					0,360 - 0,374	0,325	0,32	0,315	0,31	0,3	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	Persen					27,3											

Sumber: Data diolah, RPJ MN, RPJ MD Provinsi Sumatera Utara



Tabel 8.4  
Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2026

Misi	Indikator Tujuan	Satuan	Kondisi Awal 2020	2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Akhir 2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	C	C	B	B	B	B	A
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai	n/a	1,80	2,00	2,20	2,50	2,60	2,80
2/4	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08
3	Indeks Kualitas Udara	Nilai	n/a	91,63	91,73	91,83	91,93	92,03	92,13
	Indeks Kualitas Air	Nilai	n/a	53,71	53,81	53,91	54,01	54,11	54,21
	Indeks Kualitas Lingkungan	Nilai	n/a	43,96	45,68	47,41	49,14	50,87	52,59
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	n/a	66,93	67,39	67,84	68,30	68,76	69,21
	Indeks Resiko Bencana	Indeks	167,20	167,20	151,30	147,70	137,80	137,80	129,40
5	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	-1,36	2,74	3,00	4,00	5,20	5,55	5,90
	Gini Rasio	Rasio	0,290	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260
	Angka Kemiskinan	Persen	11,95	11,90	11,00	10,00	9,80	9,50	9,14
	Angka Pengangguran	Jiwa	5.533	5.000	4.500	4.000	3.500	3.000	2.500

Sumber: Data diolah



Tabel 8.5

Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sibolga Tahun 2021–2026

Indikator Sasaran	Satuan	Awal RPJMD	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	Akhir 2026
Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	Angka	-	CC	B	B	B	B	B
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,67	76,61	76,65	76,80	77,20	77,50	77,55
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	Indeks	0,527	0,550	0,580	0,60	0,62	0,64	0,67
Angka Harapan Hidup	Angka	69,01	69,05	69,27	69,48	69,70	69,91	70,13
Angka Kematian Ibu	Angka	53,7	217	205	194	183	183	183
Angka Kematian Bayi	Angka	3,8	19	18	17	15	13	11
Angka Kematian Balita	Angka	0	30	29	28	27	26	25
Pravalensi wasting pada Balita	Persen	2%	7%	7%	7%	6%	6%	6%
Pravalensi Angka Stunting	Persen	3,94%	10%	9,5%	9%	8,5%	8%	8%
Kualitas Makanan dan Minuman	Persen	85%	87%	89%	91%	92%	94%	95%
Penanganan Penyakit Tidak Menular	Persen	97,66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	Persen	60%	64%	68%	72%	76%	80%	82%
Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	Rasio	10,6	10,7	10,8	10,9	11	11	11,1
Puskesmas Menjadi BLUD	Unit	0	0	0	1	2	2	5 Puskesmas
Kelurahan Stop BABS	Persen	0%	5,9%	17,6%	29,4%	41,2%	52,9%	64,7%
Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks		72,649	72,919	73,149	73,379	73,609	73,839
RPPLH Kota Sibolga	Ada/ Tidak	Tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada



Indikator Sasaran	Satuan	Awal RPJMD	Tahun					
			2021	2022	2023	2024	2025	Akhir 2026
Air Minum Layak dan Berkelanjutan	Persen		67,99%	73,41%	78,83%	84,25%	89,67%	95,09%
Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen		65,00%	68,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%
Rata- Rata Lama Sekolah	Angka	10,40	10,41	10,42	10,50	10,59	10,67	10,76
Harapan Lama Sekolah	Angka	13,16	13,65	13,81	13,97	14,13	14,30	14,46
Angka Melek Huruf	Angka	99,92	100	100	100	100	100	100
Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	Rupiah	62,57	64,32	66,12	67,92	69,72	71,52	73,32
Pendapatan Daerah	Rupiah	79.539.316.412	89.181.856.201	89.504.186.535	99.921.203.656	108.106.881.827	116.984.434.387	126.802.647.344
Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97,63	97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23
Indeks Kesetaraan Gender	Indeks		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03
Jumlah Ekonomi Kreatif	Unit	n/a	5	5	5	5	5	5

Sumber: Data diolah



Tabel 8.7  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sibolga  
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	Satuan	Awal	Tahun					Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>		-	-	-	-	-	-	-
1	Indeks Gini	Indeks	0,290	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08
3	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,40	10,41	10,42	10,50	10,59	10,67	10,76
4	Harapan lama Sekolah	Tahun	13,16	13,65	13,81	13,97	14,13	14,30	14,46
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,01	69,05	69,27	69,48	69,70	69,91	70,13
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	80,67	81,00	81,50	82,00	82,50	83,00	83,50
7	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PHH)	Skor	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%

Sumber: Data Diolah



Tabel 8.8

Penvelarasan Target Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Kota Sibolga

No.	URAIAN	Satuan	RPJMD Provinsi Sumatera Utara					RPJMD Kota Sibolga						
			2019	2020	2021	2022	2023	Awal		2022	2023	2024	2025	Akhir 2026
								2020	2021					
<b>I</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>													
1	Laju Inflasi	Persen	2,95	2,90	2,85	2,80	2,75	2,42	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3	2-3
2	Indeks Gini	Indeks	0,325	0,320	0,315	0,310	0,300	0,290	0,280	0,2760	0,2740	0,270	0,265	0,260
3	Persentase Kemiskinan	Persen	8,87	8,43	8,04	7,70	7,39	11,95	11,90	11,00	10,00	9,80	9,50	9,14
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,12	71,67	72,22	72,77	73,32	73,63	73,80	73,85	73,9	74,94	75,00	75,08
5	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	90,87	90,93	91,00	91,08	91,17	97,63	97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23
6	Angka Melek Huruf	Persen	99,24	99,38	99,52	99,66	99,80		99,71	99,75	99,75	99,8	99,8	99,8
7	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,45	9,62	9,79	9,95	10,12	10,40	10,41	10,42	10,50	10,59	10,67	10,76
8	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,37	13,81	14,01	14,21	14,42	13,16	13,65	13,81	13,97	14,13	14,30	14,46
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	68,54	68,72	68,89	69,07	70,00	69,01	69,05	69,27	69,48	69,70	69,91	70,13
10	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PHH)	Persen	90,4	92,3	94,3	96,3	98,1	90%	91%	92%	93%	94%	95%	96%

Sumber: Data Diolah





Tabel 8.6  
Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sibolga  
Aspek Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2021-2026

No.	URAIAN	Satuan	Awal	Tahun					Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>II</b>	<b>Aspek Daya Saing Daerah</b>		-	-	-	-	-	-	-
1	Rasio Ketergantungan	rasio	0,45	0,45	0,44	0,43	0,42	0,41	0,40
2	Indeks Inovasi	Indeks	28 Kurang inovatif	30 Inovatif	35 Inovatif	40 Inovatif	45 Inovatif	50 Inovatif	55 Inovatif
3	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	0,527	0,550	0,580	0,60	0,62	0,64	0,67
4	Nilai SAKIP	Nilai	CC	CC	B	B	B	B	B

Sumber: Data Diolah

Tabel 8.7  
Penyelarasan Target Indikator Aspek Daya Saing Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam RPJMD Kota Sibolga

No.	URAIAN	Satuan	RPJ MD Provinsi Sumatera Utara					RPJ MD Kota Sibolga						
								Awal		2022	2023	2024	2025	Akhir 2026
			2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021					
<b>II</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>													
1	Indeks Inovasi	Indeks						Kurang Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
2	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks						0,527	0,550	0,580	0,60	0,62	0,64	0,67
3	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	BB	BB	BB	CC	CC	B	B	B	B	B

Sumber: Data Diolah



Tabel 8.8

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Sibolga  
Aspek Pelayanan Umum (Urusan Wajib Dasar, Wajib Non Dasar, Urusan Pilihan dan Penunjang urusan) Tahun 2021-2026

No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
C	ASPEK PELAYANAN UMUM										
	Layanan Urusan Wajib Dasar										
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>										
1.1			Proporsi anak – anak dan remaja (a). Pada kelas 4, (b) Tingkat akhir SD/kelas 6, (c). Tingkat akhir SMP/Kelas 3 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam (i) Membaca, (ii) matematika		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.2			Persentase SD/MI berakreditasi minimal B		97,06	97,06	97,06	100	100	100	Disdikbud
1.3			Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.4			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Sederajat		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.5			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.6			Proporsi Remaja dan Dewasa dengan ketrampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)		52	55	60	65	65	70	Disdikbud
1.7			Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 5 tahun		100	100	100	100	100	100	Disdikbud



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.8			Proporsi sekolah dengan akses (1) listrik, (2) internet untuk tujuan pengajaran, (c) Komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, € air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar perjenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi dan higienis bagi semua / WASH)		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.9			Persentase guru TK yang bersertifikat pendidik		3.30	4.12	5.49	6.87	8.24	8.24	Disdikbud
1.10			Persentase guru SD yang bersertifikat pendidik		33,05	34,48	35.92	38,79	43,1	43,1	Disdikbud
1.11			Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik		45,45	47,98	50,51	53,03	55,56	55,56	Disdikbud
1.12			Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diurus utamakan dalam (a) kebijakan pendidikan		100	100	100	100	100	100	Disdikbud



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.								
1.13		<b>(Permendagri 86/2017)</b>	Angka Partisipasi Kasar PAUD	23,59	55,27	55,82	56,38	56,94	57,51	58,09	Disdikbud
1.14			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A		87,36	88,23	89,12	90,01	90,91	91,82	Disdikbud
1.15			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B		73,89	74,63	75,38	76,13	76,89	77,66	Disdikbud
1.16			Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/ Paket A		87,36	88,23	89,12	90,01	90,91	91,82	Disdikbud
1.17			Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/ Paket B		73,89	74,63	75,38	76,13	76,89	77,66	Disdikbud
1.18			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI		0,67	0,66	0,65	0,64	0,63	0,62	Disdikbud
1.19			J uumlah Seluruh APS SD/MI se -Kabupaten dan Kota		0,79	0,78	0,77	0,76	0,75	0,74	Disdikbud
1.20			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs		0,791407575	0,706613906	0,565291125	0,494629734	0,353306953	0,211984172	Disdikbud
1.21			Angka Kelulusan (AL) SD/MI		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.22			Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.23			Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs		90	95	95	100	100	100	Disdikbud
1.24			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA		90	95	95	100	100	100	Disdikbud



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.25			Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.26			Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.27			Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar		1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	1 : 25	Disdikbud
1.28			Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar		1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1 : 15	Disdikbud
1.29			Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar		1 : 16 : 31	1 : 16 : 31	1 : 16 : 31	1 : 16 : 31	1 : 16 : 31	1 : 16 : 31	Disdikbud
1.30			Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata seolah menengah		1 : 17 : 12	1 : 17 : 12	1 : 17 : 12	1 : 17 : 12	1 : 17 : 12	1 : 17 : 12	Disdikbud
1.31			Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar		95	96	98	99	100	100	Disdikbud
1.32			Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		98,26	98,26	99	99	100	100	Disdikbud
1.33			Persentase Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.34			Persentase Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan		80	85	87	89	90	90	Disdikbud



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Pendidikan Dasar dan atau Menengah Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan								
1.35			Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD		100	100	100	100	100	100	Disdikbud
1.36		<b>Standar Nasional Pendidikan Gabungan</b>	Nilai Capaian Standar Kompetensi Lulusan	5,87	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	6,27	Disdikbud
1.37			Nilai Capaian Standar Isi	5,58	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	5,83	Disdikbud
1.38			Nilai Capaian Standar Proses	5,3	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	6,47	Disdikbud
1.39			Nilai Capaian Standar Penilaian Pendidikan	6,17	6	6	6	6	6	6	Disdikbud
1.40			Nilai Capaian Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6,02	3,4	3,4	4	4,5	5	6	Disdikbud
1.41			Nilai Capaian Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan	4,57	3,95	3,95	4	4,5	5	6	Disdikbud
1.42			Nilai Capaian Standar Pengelolaan Pendidikan	5,88	5,79	5,79	6	6	6	6,2	Disdikbud
1.43			Nilai Capaian Standar Pembiayaan	5,51	5,76	5,76	6	6	6	6,4	Disdikbud
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>										
2.1		<b>Meningkatnya Derajat</b>	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000		19	18	17	15	13	11	Dinas Kesehatan



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		<b>Kesehatan Masyarakat</b>	kelahiran hidup								
2.2			Angka kelangsungan hidup bayi		989	990	992	993	994	995	Dinas Kesehatan
2.3			Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup		30	29	28	27	26	25	Dinas Kesehatan
2.4			Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		7	5	5	4	4	3	Dinas Kesehatan
2.5			Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup		217	205	194	183	183	183	Dinas Kesehatan
2.6			Rasio posyandu per satuan balita		12	12	12	12	12	12	Dinas Kesehatan
2.7			Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0.25/1.000 penduduk	0.25/1.000 penduduk	0.25/1.000 penduduk	0.25/1.000 penduduk	0.25/1.000 penduduk	0.25/1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
2.8			Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk		0.03/1.000 penduduk	0.03/1.000 penduduk	0.03/1.000 penduduk	0.03/1.000 penduduk	0.03/1.000 penduduk	0.03/1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
2.9			Rasio dokter per satuan penduduk		1.1/1.000 penduduk	1.1/1.000 penduduk	1.1/1.000 penduduk	1.2/1.000 penduduk	1.2/1.000 penduduk	1.2/1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
2.10			Rasio tenaga medis per satuan penduduk		10.7/1.000 penduduk	10.8/1.000 penduduk	10.9/1.000 penduduk	11/1.000 penduduk	11/1.000 penduduk	11.1/1.000 penduduk	Dinas Kesehatan
2.11			Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	Dinas Kesehatan
2.12			Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan		0,9	0,92	0,92	0,95	0,95	0,95	Dinas Kesehatan
2.13			Cakupan Desa/kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Universal Child Immunization (UCI)								
2.14			Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.15			Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)								Dinas Kesehatan
2.16			Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.17			Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.18			Cakupan balita pneumonia yang ditangani		0.23%	0.3%	0.3%	0.4%	0.4%	0.5%	Dinas Kesehatan
2.19			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA		73.7%	74%	75%	76%	77%	78%	Dinas Kesehatan
2.20			Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		352	387	422	457	492	527	Dinas Kesehatan
2.21			Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)		4.6	4.5	4.3	4.3	4.1	4	Dinas Kesehatan
2.22			Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS		44%	47%	48%	49%	50%	60%	Dinas Kesehatan





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.23			Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS		93%	93.5%	94%	94.5%	95%	95.5%	Dinas Kesehatan
2.24			Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD		80.6%	81%	82%	83%	84%	85%	
2.25			Penderita diare yang ditangani		93%	94%	94.5%	95%	95.5%	96%	
2.26			Angka kejadian Malaria		1.148	1	1	1	0	0	
2.27			Tingkat kematian akibat malaria		0	0	0	0	0	0	
2.28			Proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2.29			Proporsi anak balita dengan demam yang diobati dengan obat anti malaria yang tepat		0%	0%	0%	0%	0%	0%	
2.30			Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi		0.04%	1%	1%	1%	1%	1%	
2.31			Penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi terakhir		-	-	-	-	-	-	Dinas Kesehatan
2.32			Proporsi jumlah penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS		93%	93%	94%	94%	95%	95%	Dinas Kesehatan
2.33			Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.34			Cakupan kunjungan bayi		90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.35			Cakupan puskesmas		125%	125%	125%	125%	125%	125%	
2.36			Cakupan pembantu puskesmas		82,35%	82,35%	82,35%	82,35%	82,35%	82,35%	
2.37			Cakupan kunjungan Ibu hamil K4		92%	92%	95%	95%	95%	95%	
2.38			Cakupan pelayanan nifas		90%	92%	92%	95%	95%	95%	
2.39			Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		90%	90%	90%	90%	90%	90%	
2.40			Cakupan pelayanan anak balita		90%	92%	92%	95%	95%	95%	
2.41			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin		70%	77%	79%	81%	83%	85%	
2.42			Cakupan penjangkaran kesehatan siswa SD dan setingkat		1929	2026	2127	2233	2345	2462	Dinas Kesehatan
2.43			Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.44			Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.45			Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.46			Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.47			Persentase Ibu bersalinv mendapatkan pelayanan persalinan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.48			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.49			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.50			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.51			Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.52			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas me dapatkan skrining kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.53			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.54			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
2.55			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.56			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.57			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.58		3. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia rumah sakit	Untuk mendukung Indikator Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2021–2026 Kota Sibolga, maka RSUD Dr. F. L. Tobing menetapkan Indikator Kinerja sebagai berikut:								RSU FL Tobing Sibolga
2.59		4. Terlaksananya kegiatan pelaporan dan administrasi rumah sakit dengan baik dan tepat waktu	Persentase Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit		85%	87%	88%	90%	92%	95%	RSU FL Tobing Sibolga



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.60			Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit		70%	80%	83%	85%	87%	90%	RSU FL Tobing Sibolga
2.61		5. Terlaksananya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan dan terselenggaranya Pelayanan Kesehatan	Pemenuhan Tenaga Dokter Spesialis Dasar, Penunjang dan Spesialis Lainnya		10	10	9	8	8	8	RSU FL Tobing Sibolga
2.62			Jumlah MoU kerjasama dengan perusahaan dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan.		25 Mou	27 Mou	27 Mou	30 Mou	30 Mou	30 Mou	RSU FL Tobing Sibolga
2.63		6. Terwujudnya Kesejahteraan Seluruh Karyawan	Tingkat efisiensi pelayanan rumah sakit dengan indikator : Pencapaian BOR RS sesuai Standar Nasional (= 70-80), LOS = 4 -6, TOI = 1-3, GDR = kurang dari 45, NDR = kurang dari 25								RSU FL Tobing Sibolga
2.64			1. BOR (Bed Occupancy Rate)		33%	40%	45%	50%	55%	60%	
2.65			2. AVLOS (Average Length of Stay)		4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	4 Hari	
2.66			3. TOI (Turn Over Interval)		10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	10 hari	
2.67			4. BTO (Bed Turn Over)		20 KALI	22 KALI	25 KALI	27 KALI	30 KALI	35 KALI	
2.68			5. NDR (Net Death Rate)		20 ‰	19 ‰	18 ‰	17 ‰	16 ‰	16 ‰	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.69			6. GDR ( <i>Gross Death Rate</i> )		55 %	53 %	50 %	48 %	45 %	42 %	
<b>3 Pekerjaan Umum dan Penataan ruang</b>											
		Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang)		0,77	0,81	0,85	0,89	0,91	0,95	Dinas PU PR
			Jumlah Panjang Jalan : Jumlah Penduduk		0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	Dinas PU PR
			(Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik : Panjang Jalan Kota Seluruhnya)x 100%		77,14%	81,00%	85,00%	89,01%	91,01%	95,00%	Dinas PU PR
		Meningkatnya pelayanan Sistem Drainase kota dan Lingkungan	Persentase drainase dalam kondisi baik		4,74%	5,09%	5,45%	5,81%	6,16%	6,52%	Dinas PU PR
		Meningkatnya pelayanan sumber daya air	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang dibangun (saluran terbuka dan tertutup)		400	500	300	500	500	500	Dinas PU PR
		Meningkatnya pelayanan sumber daya air	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang direhabilitasi/dipelihara (saluran terbuka dan tertutup)		2400	2200	2200	2300	2400	2500	Dinas PU PR
		Jumlah box Culvert yang dibangun	Jumlah box Culvert yang dibangun		2	5	5	5	5	5	Dinas PU PR
		Meningkatnya penataan lingkungan permukiman yang	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum		67,99%	73,41%	78,83%	84,25%	89,67%	95,09%	Dinas PU PR



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		sehat melalui pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi berkelanjutan	layak, perkotaan dan perdesaan									
			(J umlah penduduk dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindungi dan berkelanjutan / J umlah penduduk seluruhnya) x 100%		67,99%	73,41%	78,83%	84,25%	89,67%	95,09%		Dinas PU PR
			J umlah rumah tangga berakses air bersih / menggunakan layanan air minum		12818	13840	14862	15884	16906	17928		Dinas PU PR
			Jumlah rumah tangga di kabupaten/Kota		18853	18853	18853	18853	18853	18853		Dinas PU PR
			Penduduk berakses air minum		64090	69200	74310	79420	84530	89640		Dinas PU PR
			Jumlah Penduduk Seluruh Kota Sibolga		94265	94265	94265	94265	94265	94265		Dinas PU PR
			J umlah Sambungan Rumah (SR) di kawasan perkotaan		132	1154	2176	3198	4220	5242		Dinas PU PR
			Panjang Jaringan SPAM yang ditingkatkan/ dipelihara		792	6132	6132	6132	6132	6132		Dinas PU PR
			Sambungan Rumah (SR) terfasilitasi pengembangan Jaringan SPAM PDAM		132	1109	2086	3062	4038	5014		Dinas PU PR
			Sambungan Rumah (SR) terfasilitasi pengembangan		0	45	90	136	182	228		Dinas PU PR



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Jaringan SPAM Non PDAM									
			Jumlah kebutuhan air baku yang sudah dapat dilayani Liter/Tahun		7.227.000	63.181.500	119.136.000	175.090.500	231.045.000	286.999.500		Dinas PU PR
			Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). *) Indikator SDGs dan PMDN		65,00%	68,00%	75,00%	80,00%	85,00%	90,00%		Dinas PU PR
			(Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa Cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD / Jumlah rumah seluruh kota) x 100%		0,65%	1,30%	1,96%	2,61%	3,26%	3,91%		Dinas PU PR
			6.3.1.(b) Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja:									Dinas PU PR
			Jumlah rumah tangga berakses sanitasi		12255	12820	14140	15082	16025	16968		Dinas PU PR
			Jumlah rumah tangga di kabupaten/Kota		18853	18853	18853	18853	18853	18853		Dinas PU PR
			Jumlah rumah tangga yang terlayani sistem		123	246	369	492	615	738		Dinas PU PR





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			pengelolaan lumpur tinja.								
			((Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan gedung pemerintah x40%)+(Jumlah bangunan ber - IMB/jumlah bangunan x 40%)		53,13	54,01	54,88	56,15	57,42	58,69	Dinas PU PR
			Jumlah gedung pemerintah dalam kondisi baik/jumlah keseluruhan gedung pemerintah x40%		30	30,77	31,54	32,69	33,85	35,00	Dinas PU PR
			Jumlah gedung / bangunan pemerintah dalam kondisi baik		76	80	82	85	88	91	Dinas PU PR
			Jumlah keseluruhan gedung / bangunan pemerintah		104	104	104	104	104	104	Dinas PU PR
			Jumlah bangunan ber - IMB/jumlah bangunan x 40%		23,13	23,24	23,34	23,46	23,57	23,69	Dinas PU PR
			Jumlah bangunan ber - IMB		68,196	69,056	69,956	70,906	71,906	72,956	Dinas PU PR
			Jumlah bangunan seluruh kota		117,946	118,867	119,867	120,917	122,017	123,167	Dinas PU PR
			Jumlah Dokumen perencanaan tata ruang yang tersedia dibagi dengan jumlah kebutuhan dokumen penataan ruang		0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	Dinas PU PR



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Meningkatnya layanan pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah	Rata-rata persentase pencapaian program pada masing-masing sekretariat perangkat daerah		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU PR
			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU PR
			Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU PR
			Capaian peningkatan sarana dan prasarana kondisi baik dan kualitas SDM OPD		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas PU PR
<b>4</b>	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>										
4.1		Ketersediaan Rumah Layak Huni	Rasio rumah layak huni		0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	Dinas PKPLH
4.2			Rasio permukiman layak huni		80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas PKPLH
4.3			Cakupan ketersediaan rumah layak huni		73%	74%	75%	76%	77%	78%	Dinas PKPLH
4.4			Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau		73%	74%	75%	76%	77%	78%	Dinas PKPLH
4.5		Permukiman Kumuh yang Tertata	Persentase pemukiman yang tertata		80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas PKPLH
4.6			Persentase lingkungan pemukiman kumuh		15%	14%	13%	12%	11%	10%	Dinas PKPLH
4.7			Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		15%	15%	15%	15%	15%	15%	Dinas PKPLH



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.8			Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan		27%	26%	25%	24%	23%	22%	Dinas PKPLH
4.9		Lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU		80%	80%	80%	80%	80%	80%	Dinas PKPLH
<b>5 Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>											
5.1		Terwujud Kondusifitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat Kota Sibolga	Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan pada Satu Tahun Terakhir		0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	0 Kasus	Satpol PP
5.2			Kematian disebabkan Konflik Per 100.000 Penduduk		0 Kematian	0 Kematian	0 Kematian	0 Kematian	0 Kematian	0 Kematian	Satpol PP
5.3			Proporsi Penduduk yang Menjadi Korban Kejahatan Kekerasan dalam 12 Bulan Terakhir		34%	34%	36% (Naik karena Pilkada)	35%	32%	33%	Satpol PP
5.4			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya		80%	82%	83%	83%	84%	85%	Satpol PP
5.5			Cakupan Petugas Pelindungan Masyarakat (LINMAS)		tidak	ada	pemekaran	wilayah	Kota	Sibolga	Satpol PP
5.6			Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)		66%	67%	68%	70%	73%	75%	Satpol PP



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.7			Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
5.8			Tingkat Waktu Tanggap ( <i>Response Time Rate</i> ) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
5.9			Persentase Penegakkan PERDA		70%	77%	80%	85%	87%	90%	Satpol PP
5.10			J umlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
5.11			J umlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
<b>6</b>	<b>Sosial</b>										
6.1		Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan Sosial		0	15	30	50	75	100	Dinas Sosial
6.2			Persentase PMKS yang tertangani		0	15	30	50	75	100	Dinas Sosial
6.3			Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan Sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		0	15	30	50	75	100	Dinas Sosial



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.4			Kelompok PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		0	10	20	30	40	50	Dinas Sosial
6.5			Persentase Panti Sosial yang menyediakan sarana Prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial		Sesuai dengan Permensos RI No. 09 Tahun 2018, Panti sosial bukan urusan Dinas Sosial Kab/Kota.						Dinas Sosial
6.6			Persentase Wahana kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial		0	0	33	0	66	100	Dinas Sosial
6.7			Persentase Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa Tanggap darurat		0	80	80	80	80	80	Dinas Sosial
6.8			Persentase Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		0	80	80	80	80	80	Dinas Sosial
6.9			Persentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan Sosial		0	10	20	30	40	50	Dinas Sosial



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.10			Persentase Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti		0	10	20	30	40	50	Dinas Sosial
<b>Wajib Non Dasar</b>											
<b>1 Tenaga Kerja</b>											
1.1	Tenaga Kerja		Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun		-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
1.2		Tingkat Pengangguran Terbuka	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		80	80	80	80	80	80	
1.3		Tingkat Pengangguran Terbuka	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan		40	45	50	60	70	80	
1.4		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Keselamatan dan Perlindungan		30	40	50	60	70	80	
1.5		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		60	63	67	71	76	80	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan
1.6			Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah		-	-	-	-	-	-	
1.7		Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Besaran Pemeriksaan Perusahaan		100	100	100	100	100	100	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.8			Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan		-	-	-	-	-	-	
1.9		Tingkat Pengangguran Terbuka	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		70	70	75	75	80	80	
1.10		Tingkat Pengangguran Terbuka	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat		70	70	75	75	80	80	
1.11		Tingkat Pengangguran Terbuka	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan		70	70	75	75	80	80	
1.12			Rasio lulusan S1/ S2/ S3		-	-	-	-	-	-	
<b>2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>											
2.1		mewujudkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menuju masyarakat yang sehat, pintar dan makmur	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah		15,2	18	20	24	28	30	DPMKPPPA
2.2			Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		25	25	25	30	30	30	
2.3			Partisipasi perempuan di Lembaga Swasta		5520	5570	5620	5670	5720	5770	
2.4			Rasio KDRT		5	4	3	1	1	0	
2.5			Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur		0	0	0	0	0	0	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.6			Partisipasi angkatan kerja perempuan		24,42	25,42	26,42	27,42	28,42	29,42	
2.7			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		100	100	100	100	100	100	
2.8			Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tata laksana KTP/a dan PPT/PKT di RS		100	100	100	100	100	100	DPMKPPA
2.9			Cakupan layanan Rehabilitas sosial yang diberikan oleh petugas Rehabilitas social terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu		100	100	100	100	100	100	
2.10			cakupan Penegakan hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus		100% (1)	0	0	0	0	0	





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			kekerasan terhadap perempuan dan anak									
2.11			Cakupan perempuan dan anak korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum		100	100	100	100	100	100		
2.12			Cakupan Layanan Pemulangan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA	
2.13			Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		100	100	100	100	100	100		
2.14			Rasio APM perempuan /laki-laki di SD		87,42	88,12	88,82	89,52	90,22	90,92		
2.15			Rasio APM perempuan /laki-laki di SMP		89,66	90,16	90,66	91,16	91,66	92,16		
2.16			Rasio APM perempuan /laki-laki di SMA		0	0	0	0	0	0		
2.17			Rasio APM perempuan /laki-laki di Perguruan Tinggi		0	0	0	0	0	0		
2.18			Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun		0,98	0,93	0,88	0,83	0,78	0,73		
2.19			Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian		24,64	25,64	26,64	27,69	28,64	29,64		
2.20			Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan ( umur 15 - 64 tahun) yang		0	0	0	0	0	0		DPMKPPPA



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			mengalami kekerasan (fisik, seksual atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir								
2.21			Prevelensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan		0	0	0	0	0	0	
2.22			Proporsi perempuan dewasa dan anak yang mengalami kekerasan oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir		0	0	0	0	0	0	
2.23			Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		0	0	0	0	0	0	
2.24			Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan		55	61	67	73	81	89	
2.25			Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun		130	125	120	115	110	105	DPMKPPPA
2.26			Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia		7	6	5	4	3	1	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			(HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan									
2.27			Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin,usia,status disabilitas,dan tempat kejadian (12 bln terakhir)		3	2	1	0	0	0		
2.28			Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi		5	4	3	2	1	0		
2.29			Proporsi penduduk yang mengalami kekerasan secara fisik,psikologi atau seksual 12 bulan terakhir		2	1	0	0	0	0		
2.30			Angka harapan hidup pada saat lahir (e) laki - laki dan perempuan		97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23		DPMKPPA
2.31			Harapan lama sekolah (EYS) laki -laki & perempuan. 2) Rata - rata lama sekolah (MYS) :laki--laki & perempuan		97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23		
2.32			Perkiraan Pendapatan laki-laki & perempuan		97,73	97,83	97,93	98,03	98,13	98,23		



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.33			Proporsi Keterakilan di Parlemen laki-laki dan perempuan		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03	
2.34			Proporsi dari manager, staf administrasi pekerja profesional dan teknisi, laki-laki dan perempuan		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03	
2.35			Upah Buruh Non Pertanian, laki-laki dan perempuan		73,53	74,03	74,53	75,03	75,53	76,03	
<b>3 Pangan</b>											
3.1		Meningkatnya ketersediaan dan keaneka ragaman pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		90%	91%	92%	93%	94%	95%	Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian
3.2			Ketersediaan pangan utama		70	70	70	70	70	80	
3.3.1			Ketersediaan Energi Per Kapita		2084,9	2084,9	2084,9	2084,9	2085	2085	
3.3.2			Ketersediaan Protein per Kapita		55,8	55,8	55,8	55,8	56	56	
3.4			Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan		70	80	85	85	85	85	
<b>4 Pertanahan</b>											
		Terwujudnya Pemanfaatan Ruang melalui Penataan kepemilikan dan									Dinas PU PR



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Perizinan Tanah dengan Optimal melalui:									
4.1			Persentase Luas Lahan Bersertifikat		80,00	82,5	85	87,5	90	92,5	Dinas PU PR
4.2			Penyelesaian Kasus Tanah Negara		0	0	0	0	0	0	Dinas PU PR
4.3			Penyelesaian Ijin Lokasi		0	50	50	50	100,00	100,00	Dinas PU PR
<b>5</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>										
5.26		Tersedianya RPPLH Kota Sibolga	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas PKPLH
5.27			Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.28		Tersedianya data dan informasi kualitas lingkungan hidup	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.29			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air		1,0<IP≤5,0	1,0<IP≤5,0	1,0<IP≤5,0	1,0<IP≤5,0	1,0<IP≤5,0	1,0<IP≤5,0	
5.30			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara		91,63	91,73	91,83	91,93	92,03	92,13	
5.31			Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan		45,4	46	46,5	47	47,5	48	
5.32		Meningkatnya usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dokumen dan izin lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas PKPLH



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota								
5.33			Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota		0	0	1	0	0	0	Dinas PKPLH
5.34			Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan , izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah/kabupaten/ Kota, Lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.35		-	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA		-	-	-	-	-	-	
5.36			Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional		-	-	-	-	-	-	
5.37			Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional		-	-	-	-	-	-	
5.38			Penetapan Hak MHA		-	-	-	-	-	-	
5.39			Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan		-	-	-	-	-	-	
5.40			Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana		-	-	-	-	-	-	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.41		Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan persampahan	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat		0	0	1	1	1	1	
5.42			Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
5.43			Timbulan sampah yang ditangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	
5.44			Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		75	78	80	82	85	90	
5.45			Persentase cakupan area pelayanan		85	87	90	92	95	98	
5.46			Persentase jumlah sampah yang tertangani		75%	80%	85%	90%	95%	100%	
5.47			Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota		85	85	85	85	85	85	
5.48			Persentase izin pengelolaan sampah oleh Swasta yang diterbitkan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5.49			Persentase pengelolaan sampan oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang - undangan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
<b>6</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil</b>										
		Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi kependudukan	A. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pencatatan sipil								



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		dan pencatatan sipil									
6.1			1. Rasio bayi berakte Kelahiran		97,5%	98%	98,4%	99%	99.4%	100%	Dukcapil
6.2			2. Rasio pasangan berakte Nikah		75%	78%	80%	83%	85%	90%	Dukcapil
6.3			3. Cakupan penerbitan Akta Kelahiran		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dukcapil
6.4			4. Persentase anak (usia 0 s.d. 18 tahun) yang memiliki akta kelahiran		96%	97%	98%	99%	100%	100%	
6.5			5. Persentase cakupan akta kematian yang diterbitkan		96%	97%	98%	99%	100%	100%	
6.6			6. Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya tercatat		87%	88%	89%	90%	91%	92%	
6.7			7. Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian dari semua individu yang perceraianya tercatat		62%	63%	63,50%	64%	65%	66%	
			<b>B. Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan pendaftaran penduduk</b>								
6.8			1. Rasio penduduk ber - KTP per satuan penduduk.		100%	100%	100%	100%	100%	100%	





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.9			2. Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.10			3. Persentase penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)		98%	99%	100%	100%	100%	100%	Dukcapil
6.11			4. Persentase Penerbitan Kartu Keluarga dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE)		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.12			5. Persentase penerbitan KIA dan pemanfaatan KIA dalam pelayanan Adminduk		50%	65%	70%	75%	85%	90%	
6.13			6. Jumlah penduduk yang tidak memiliki dokumen terselesaikan dalam pengurusan dokumen		25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	25 Org	
6.14			7. Jumlah Penduduk Non Permanen yang di Data		25 Org	26 Org	27 Org	28 Org	29 Org	30 Org	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan dan pemanfaatan Database Kependudukan	<b>C. Meningkatnya pendayagunaan data kependudukan untuk semua keperluan</b>								
6.15			1. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
6.16			2. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6.17			3. Jumlah OPD yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan untuk pelayanan publik		1 OPD	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD	5 OPD	
6.18			4. Jumlah Buku Profil Perkembangan Kependudukan		1	1	1	1	1	1	
6.19			5. Jumlah Buku Agregat Kependudukan		1	1	1	1	1	1	
6.20			6. Persentase Dokumen Kependudukan Terintegrasi Dalam Sistem Arsip Digital berbasis SIAK		25%	26%	28%	29%	30%	32%	
6.21			7. Persentase Dokumen Pencatatan Sipil Terintegrasi Dalam Sistem Arsip Digital berbasis SIAK		25%	26%	28%	29%	30%	32%	
<b>7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>											
		mewujudkan pemberdayaan masyarakat Kelurahan menuju masyarakat yang sehat, pintar dan makmur	cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA
			Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga Pemberdayaan masyarakat (LPM)		17	17	17	17	17	17	DPMKPPPA
			Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK		17	17	17	17	17	17	DPMKPPPA



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persentase LSM aktif		38	38	38	38	38	38	DPMKPPPA
			Persentase LPM berprestasi		17,6	23,5	29,4	35,2	41,1	47,05	DPMKPPPA
			Persentase PKK aktif		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA
			Persentase Posyandu aktif		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA
			Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA
			Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan masyarakat		100	100	100	100	100	100	DPMKPPPA
<b>8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>											
8.1		Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Serta Penurunan Angka Stunting	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.2			Total Fertility Rate (TFR)		2,65	2,64	2,59	2,52	2,46	2,40	
8.3			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB		50	51	52	53	54	55	
8.4			Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk		20	30	40	50	60	70	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.5			Jumlah Kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk		0	0	0	0	0	0	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.6			Jumlah Sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan								Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.7			Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan		1	2	2	3	3	3	
8.8			Rata-rata jumlah anak per keluarga		3,70	3,60	3,50	3,40	3,30	3,20	
8.9			Ratio Akseptor KB								
8.10			Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49		69,75	69,80	69,85	69,90	69,95	70,00	
8.11			Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.12			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.13			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		13,40	13,00	12,65	11,9	11,15	10,40	
8.14			Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		60,16	60,3	60,45	60,85	70,00	70,15	
8.15			Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi		45,10	45,30	45,40	45,70	45,85	46,00	
8.16			Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB		70%	72%	73%	74%	75%	77%	
8.17			Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB		70%	73%	74%	75%	76%	78%	
8.18			Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB		70%	72%	73%	74%	75%	77%	
8.19			Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.		0	1%	1%	2%	3%	4%	
8.20			Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa		75%	77%	77%	78%	79%	80%	
8.21			Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk								
8.22			Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri		65%	65%	65%	65%	65%	65%	
8.23			Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.24			Cakupan ketersediaan dan distribusi alat obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat		70%	70%	70%	70%	70%	70%	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.25			Persentase Faskes dan jejaringnya seluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan		75%	75%	75%	75%	80%	80%	
8.26			Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa								
8.27			Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)		0	0	0	0	0	0	
8.28			Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			keluarga melalui 8 fungsi keluarga								
8.29			Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak								Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
8.30			Rata-rata usia kawin pertama wanita		20%	20%	21%	21%	21%	21%	
8.31			Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes		50%	60%	70%	80%	90%	100%	
<b>9 Perhubungan</b>											
9.1.a		Meningkatnya sarana prasarana dan fasilitas perhubungan untuk pengendalian keselamatan lalu lintas jalan	J umlah arus penumpang angkutan umum (Masuk)		678.345	712.262	747.875	785.269	824.533	865.759	Dinas Perhubungan
9.1.b			J umlah arus penumpang angkutan umum (Keluar)		933.510	980.186	1.029.195	1.080.655	1.134.687	1.191.422	
9.2			Rasio Ijin Trayek		0,066	0,071	0,075	0,080	0,085	0,089	
9.3			J umlah Uji Kir Angkutan Umum		0	0	0	0	0	0	Dinas Perhubungan



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
9.4			J uumlah Pelabuhan Laut/ Udara / Terminal Bis		1	1	1	1	1	1	
9.5			Persentase Layanan Angkuatan Darat		0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	
9.6			Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum		0	0	0	0	0	0	
9.7			Pemasangan Rambu – rambu		71,05	76,94	82,82	88,70	94,58	100,4	
9.8			Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan								
9.9			Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum		1.611.855	1.692.448	1.777.070	1.865.924	1.959.220	2.057.181	
9.10			Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per tahun		12.083	33.000	36.300	39.930	43.923	48.315	
<b>10</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>										
10.1		- Meningkatkan keterbukaan informasi publik	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo Kota Sibolga
10.2		- Meningkatkan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik	Cakupan Layanan Telekomunikasi		100	100	100	100	100	100	Dinas Kominfo Kota Sibolga
10.3			Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		70	71	72	73	74	75	





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
10.4			Proporsi rumah tangga dengan akses internet		30	31	32	33	34	35	
10.5			Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi		40	42	43	44	45	46	
<b>11 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>											
11.1		Peningkatan jumlah Koperasi Aktif	Persentase koperasi aktif		72	72,5	73	73,5	74	75	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
11.2			Persentase UKM Non BPR/ LKM aktif		-	-	-	-	-	-	
11.3			Persentase BPR/ LKM aktif		-	-	-	-	-	-	
11.4		Meningkatnya Pelaku Usaha Mikro Kecil	Persentase usaha mikro dan kecil		80	81	82	83	84	85	
11.5		Peningkatan Daya Saing wirausaha ekonomi kreatif	J uumlah Pelaku Ekonomi Kreatif		30	30	30	30	30	30	
<b>12 Penanaman Modal</b>											
12.1		Pertumbuhan investasi	J uumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		5	5	5	5	5	5	DPM-PPTSP
12.2		Peningkatan Nilai investasi	J uumlah Nilai Investasi berskala Nasional (PMDN/PMA)		2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	
12.3		Pertumbuhan Daya Serap Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja		50 / 5	50 / 5	50 / 5	50 / 5	50 / 5	50 / 5	
12.4		Perkembangan Investasi	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.5		Peningkatan Mutu Pelayanan	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan		750	600	600	600	600	600	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
12.6		Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin	Persentase Penyelesaian Izin		95%	95%	95%	95%	95%	95%	
12.7		Kemudahan Pelayanan Izin secara Online	Perizinan Berbasis IT		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
12.8		Kepastian Informasi Pelaku Usaha untuk Berinvestasi di Kota Sibolga	Potensi dan Produk Investasi yang sudah FS (Feasibility study/Study Kelayakan)		1	1	1	1	1	1	
12.9		Kemudahan Pelayanan Fasilitas Penanaman modal	J uumlah Pelaku Usaha Yang Mengusulkan Permintaan Fasilitas Penaaman Modal		1	1	1	1	1	1	DPM-PPTSP
<b>13 Kepemudaan dan Olah Raga</b>											
13.1		Meningkatkan Prestasi dan kualitas Pemuda	Presentase Organisasi Pemuda yang Aktif		65%	65,65%	66,31%	66,97%	67,64%	68,32%	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
13.2			Presentase Wirausaha Muda		10%	10,10%	10,20%	10,30%	10,41%	10,51%	
13.3		Meningkatnya prestasi olahraga	Jumlah Cabor Yang di bina		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
13.4			Cakupan Pelatih yang bersertiifikasi		75%	75,75%	76,51%	77,27%	78,05%	78,83%	
13.5			Cakupan Pembinaan Atlet Muda		100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
13.6			Jumlah atlet Berprestasi		1	5	6	8	8	8	
13.7			Jumlah Prestasi Olahraga		1	3	3	3	3	3	
<b>14 Statistik</b>											
14.1			Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Komunikasi



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
14.2			Buku "kabupaten dalam angka"		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	dan Informatika
14.3			Buku "PDRB"		Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	
<b>15</b>	<b>Persandian</b>										
15.1			Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah		0	30	40	50	60	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
<b>16</b>	<b>Kebudayaan</b>										
16.1		Pelestarian kesenian tradisional	Penyelenggaraan festival seni dan budaya		10	10	10	10	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.2		Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan		2	2	2	2	2	2	
16.3			Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi		1	1	1	1	1	1	
16.4			Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu		1	1	1	1	1	1	
16.5		Pengembangan Kebudayaan	Kebudayaan daerah yang dilestarikan dan dikembangkan		30	30	30	32	32	34	
16.6		Pembinaan Sejarah	Jumlah Adat Istiadat / Sejarah yang duibina		20	22	24	26	28	30	
16.7		Pengelolaan Permuseuman	Pembangunan Gedung Museum		1	1	1	1	1	1	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>17 Perpustakaan</b>											
		Terpantaunya sirkulasi dan data kegiatan perpustakaan	Persentase pengembangan dan pembinaan pengelolaan perpustakaan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan
17.1			Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun		20000 : 65.222 = 0,31	22000 : 65.535 = 0,33	24000 : 65.847 = 0,35	26.000 : 66.159 = 0,29	27.000 : 66.471 = 0,40	28000/66.783 = 0,41	
17.2			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah		11255 : 31470 = 0,40	1505 : 33690 = 0,40	1510 : 35,930 = 0,40	1515 : 38,190 = 0,40	1520 : 40,470 = 0,40	1525 : 42770 = 0,40	
17.3			Rasio perpustakaan persatuan penduduk		(159/95066)X1.000 = 1,67	(146/95366) X 1.000 = 1,73	(179/95666)X 1.000 = 1,79	(146/95966)X 1.000 = 1,84	(146/96266)X 1.000 = 1,90	(189/96.566) X 1.000 = 1,95	
17.4			Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun		20.000	22.000	24.000	26.000	27.000	28.000	
17.5			Jumlah koleksi judul buku perpustakaan		12.755	14.260	15.770	17.285	18.805	20.330	
17.6			Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat		7/7×100=100%	7/7×100=100%	8/8×100=100%	8/8×100=100%	9/9×100=100%	9/9×100=100%	
<b>18 Kearsipan</b>											
18.1		Pembinaan dan Peningkatan kualitas tata kelola dan penyelamatan kearsipan	Persentase pengelolaan kearsipan		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perpustakaan
18.2			Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku		30/30×100 =100%	30/30×100=100%	30/30×100=100%	30/30×100=100%	30/30×100=100%	30/30×100=100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
18.3			Peningkatan SDM pengelola kearsipan		1	1	1	1	1	1	
<b>PILIHAN</b>											
<b>1 Pariwisata</b>											
1.1		Meningkatkannya kualitas dan kuantitas sarana prasarana pariwisata	J uumlah Kawasan Strategis Pengembangan Pariwisata Kota yang dikembangkan		1	1	1	1	1	1	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
1.2			PAD Sektor Pariwisata		3,00%	3,03%	3,06%	3,09%	3,12%	3,15%	
1.3		Meningkatnya promosi/pemasaran pariwisata daerah	Lama Kunjungan Wisata		2	2,02	2,04	2,06	2,08	2,10	
1.4			J uumlah Kunjungan wisata		40.000 orang	40.400 orang	40.800 orang	41.210 orang	41.625 orang	42.040 orang	
1.5			Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif		3	3	3	3	3	3	
<b>2 Pertanian</b>											
2.1		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.2		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	
2.3		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.4		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	
2.5		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Produktivitas Padi per hektar		4	4	5	5	5	5	
2.6		Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri	Cakupan bina kelompok petani		100	100	100	100	100	100	
<b>3 Kehutanan</b>											
TIDAK ADA											
<b>4 Energi dan Sumber Daya Menieral</b>											
TIDAK ADA											
<b>5 Perdagangan</b>											
5.1		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pelayanan terhadap Pelaku Usaha dalam Upaya Pengembangan Usaha Perdagangan Serta Terwujudnya Tertib Ukur dan Perlindungan Konsumen	Ekspor Bersih Perdagangan		tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	tidak dapat dilaksanakan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.2			Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal		14,10%	15,51%	17,07%	18,77%	20,65%	22,72%	
<b>6 Perindustrian</b>											
6.1		Meningkatkan Pengembangan IKM, Sentra – Sentra Industri Potensial dan Peningkatan Daya Saing	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin		53%	55%	60%	65%	70%	75%	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
<b>7 Transmigrasi</b>											
TIDAK ADA											
<b>8 Kelautan dan Perikanan</b>											
8.1		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Produksi Perikanan		90	90	95	95	95	95	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
8.2		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Konsumsi Ikan		90	90	95	95	95	95	
8.3		Terwujudnya masyarakat yang sejahtera dan mandiri	Cakupan bina kelompok nelayan		90	90	95	95	95	95	
8.4		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Produksi perikanan kelompok nelayan		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Dinas Perikanan, Ketahanan



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
											Pangan dan Pertanian
8.5		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	
8.6		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	
8.7		Meningkatnya produksi perikanan dan pertanian	Nilai Tukar Nelayan		Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	Tidak Dapat Dilaksanakan	
<b>Penunjang</b>											
<b>1 Sekretariat Daerah</b>											
1.1		Terlaksananya Pembangunan yang Sinergi dan Terkoordinasi	Jumlah OPD yang mengelola Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik		28	29	30	31	32	33	Sekretariat Daerah – Bagian Administrasi Pembangunan
1.2		Mewujudkan Fasilitas Administrasi, Koordinasi dan Pengawasan di bidang Pembangunan Perekonomian yang Terpadu dan Komperensif	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi dan Koordinasi di Bidang Perekonomian		100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah – Bagian Kesra





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1.3		Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah – Bagian Kesra
1.4		Terwujudnya Harmonisasi dan Sikronisasi Rancangan Produk Hukum yang sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan, Kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah.	Tersedianya Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum		100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah – Bagian Hukum
1.5		Meningkatnya Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah		16	16	16	16	16	16	Sekretariat Daerah – Bagian Tata Pemerintahan
1.6		Tertatanya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi dibidang rumah tangga dan perlengkapan, komunikasi pimpinan dan protokol dan tata		12	12	12	12	12	12	Sekretariat Daerah – Bagian Umum



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			usaha pimpinan dan staf ahli								
1.7		Tercapainya Penataan organisasi pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Terlaksananya Pelayanan Publik, Penataan dan Evaluasi tentang Kelembagaan Serta Reformasi Birokrasi		100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah – Bagian Organisasi
<b>2 Sekretariat Dewan</b>											
2.1		Tercapainya prinsip penyelenggaraan Pemerintahan yang transparan dan akuntabel									SET. DPRD
2.2			Penyampaian pertanggungjawaban keuangan tepat waktu		100	100	100	100	100	100	
2.3			Tersedianya dokumen perencanaan, kinerja, dan pertanggungjawaban Set DPRD		12	11	11	11	11	11	
2.4			J umlah rapat pembahasan anggaran antara pihak Legislatif dengan Eksekutif/OPD		132	132	132	132	132	132	
2.5		Terlaksananya Penyelenggaraan Fungsi kelembagaan Legislatif Daerah dan Partisipasi masyarakat dalam kegiatan DPRD	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota		1	1	1	1	1	1	SET. DPRD



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
2.6			Tersusun dan Terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)		1	1	1	1	1	1	
2.7			Jumlah pelaksanaan Koordinasi dan Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD		38	38	38	38	38	38	
2.8			Jumlah Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Anggota DPRD dengan masyarakat		36	36	36	36	36	36	
2.9			Jumlah penyelenggaraan Monitoring dan Reses anggota DPRD		39	39	39	39	39	39	SET. DPRD
2.10			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan DPRD		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
2.11			Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, Pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan		1	1	1	1	1	1	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD.								
<b>3 Perencanaan</b>											
3.1		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJ PD yang telah ditetapkan dengan Perda		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.2			Tersedianya dokumen perencanaan : RPJ MD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
3.3			Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3.4			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD		100	100%	100%	100%	100%	100%	
3.5			Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD		100	85%	85%	86%	86%	87%	
<b>4 Keuangan</b>											
4.1			Opini BPK terhadap laporan keuangan		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
4.2			Persentase SILPA		10%	8%	7%	5%	3%	0%	
4.3			Persentase SILPA terhadap APBD		10%	8%	7%	5%	3%	0%	
4.4.1			Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4.4.2			Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana		0,5%	0,4%	0,3%	0,2%	0,1%	0%	
4.5			Persentase belanja pendidikan (20%)		20%	20%	20%	20%	20%	20%	
4.6			Persentase belanja kesehatan (10%)		10%	10%	10%	10%	10%	10%	BPKAD
4.7.1			Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		75%	75%	75%	75%	75%	75%	
4.7.2			Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung		25%	25%	25%	25%	25%	25%	
4.8			Bagi hasil kabupaten/kota dan desa		0	0	0	0	0	0	
4.9			Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	
4.10			Persentase PAD Terhadap Pendapatan		95%	95%	95%	95%	95%	95%	
4.11			Persentase luas lahan bersertifikat		10%	10%	10%	10%	10%	10%	
<b>5 Kepegawaian</b>											
5.1		Terwujudnya ASN yang Profesional	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	BKD
5.2			Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal		2,73%	2,94%	3,15%	3,37%	3,79%	4,21%	
5.3			Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah		30	30	30	30	30	30	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
5.4			J uumlah J abatan Administrasi pada instansi pemerintah		524	524	524	524	524	524	BKD
5.5			J uumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah		1185	1185	1185	1185	1185	1185	
5.6		Terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan		14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	
5.7		Meningkatkan tata kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan perangkat daerah		4	4	4	4	4	4	
<b>6 Penelitian dan Pengembangan</b>											
6.1		Peningkatan Kelitbangan dengan Inovasi	Persentase implementasi rencana kelitbangan	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.2			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	
<b>Penerapan SIDA:</b>											
6.3			Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	5 OPD	Semua OPD yang mengusulkan	Semua OPD yang mengusulkan	Semua OPD yang mengusulkan	Semua OPD yang mengusulkan	Semua OPD yang mengusulkan	Semua OPD yang mengusulkan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6.4			Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	n/a	20%	20%	20%	20%	20%	20%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>7 Pengawasan</b>											
7.1		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Presentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan APIP		92%	94%	95%	96%	97%	98%	Inspektorat
7.2			Presentase Penyelesaian Tindak lanjut Pengawasan BPK		92%	94%	95%	96%	97%	98%	
7.3		Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	Persentase Pelanggaran Pegawai		2,35%	2%	1,5%	1%	0,5%	0,4%	
7.4		Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Temuan BPK		12	10	8	6	4	2	
7.5		Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)		3,7	3,8	3,8	3,8	4,0	4,5	Inspektorat
7.6			Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	
7.7		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Presentase penyelesaian Kasus Pengaduan Masyarakat yang ditangani		92%	94%	95%	96%	97%	98%	
7.8		Nilai Indeks Profesionalisme ASN Meningkat	Level Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 4	Level 4	Level 4	Level 5	
<b>8 Kewilayahan</b>											
<b>8.1 Kec. Sibolga Utara</b>											
8.1.1		Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional	Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN		80%	81%	82%	83%	84%	85%	Kecamatan Sibolga Utara



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.1.2		Terlaksananya kegiatan dan koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang	Persentase Kepuasan Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan		80%	81%	82%	83%	84%	85%	Kecamatan Sibolga Utara
8.1.3		Penyampaian Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Presentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.1.4		Meningkatnya partisipasi masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas diri.	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Kegiatan Pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan		80%	81%	82%	83%	84%	85%	
8.1.5			Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan		80%	81%	82%	83%	84%	85%	
8.1.6			Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan dalam Pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan		80%	81%	82%	83%	84%	85%	Kecamatan Sibolga Utara
<b>8.2 Kecamatan Sibolga Kota</b>											
8.2.1		Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat		75%	77%	79%	81%	83%	85%	Kecamatan Sibolga Kota
8.2.2		Penyampaian Dokumen	Persentase Penyampaian Dokumen		100%	100%	100%	100%	100%	100%	





No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Perencanaan Tepat Waktu	Perencanaan Tepat Waktu								
8.2.3		Penyampaian Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Presentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.2.4		Meningkatnya partisipasi masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas diri.	Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan STQ/MTQ di Tingkat Kecamatan		150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	150 Orang	
8.2.5			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	Kecamatan Sibolga Kota
8.2.6			Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan		330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	
8.2.7			Frekuensi Pelaksanaan Gotong royong		48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	
8.2.8			Frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat		8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	
8.2.9			Frekuensi Pameran Pembangunan dalam Rangka Hari Jadi Sibolga		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
8.2.10			Frekuensi Pameran dalam Rangka Perayaan HUT RI		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.2.11			Jumlah peserta pada pelaksanaan PORKOT		400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	400 Orang	
8.2.12			Jumlah balita kemas/Posyandu dan Lansia yang menerima makanan tambahan		41 posyandu	41 posyandu	41 posyandu	41 posyandu	41 posyandu	41 posyandu	
8.2.13		Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah dengan masyarakat	Frekuensi pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Sibolga Kota		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	Kecamatan Sibolga Kota
8.2.14			Monitoring Tim delegasi Kecamatan pada penilaian kelurahan terbaik dan Kelurahan Percontohan		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
8.2.15			Koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan instansi vertical di Wilayah Kecamatan		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
<b>8.3 Kecamatan Sibolga Sambas</b>											
8.3.1		Terlaksananya pelayanan yang prima dan professional	Rata-rata penyelesaian pelayanan administrasi sampai tingkat kecamatan tepat waktu melalui PATEN		70%	75%	80%	90%	95%	100%	Kecamatan Sibolga Sambas
8.3.2		Terlaksananya kegiatan dan koordinasi guna peningkatan hasil pelaksanaan musrenbang, PAM Swakarsa,	Persentase Kepuasan Terlaksananya kegiatan peningkatan mutu penyelenggaraan realisasi hasil perencanaan pembangunan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.3.3		Penyampaian Pertanggung jawaban Keuangan Tepat Waktu	Presentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kecamatan Sibolga Sambah
8.3.4		Meningkatnya partisipasi masyarakat guna pening katan keteram pilan dan kualitas diri.	Persentase Kepuasan masyarakat Terhadap Kegiatan Pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	
8.3.5			Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pelaksana an Festival Seni Qasidah/ Nasyid di Tingkat Kecamatan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	
8.3.6			Persentase Kepuasan masyarakat terhadap kegiatan dalam Pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan		75%	80%	85%	90%	95%	100%	
<b>8.4 Kecamatan Sibolga Selatan</b>											
8.4.1		Meningkatnya Pelayanan Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat		75%	77%	79%	81%	83%	85%	Kecamatan Sibolga Selatan
8.4.2		Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.4.3		Penyampaian Pertanggung jawaban	Presentase Penyampaian Pertanggungjawaban Keuangan Tepat Waktu		100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Kuangan Tepat Waktu									
8.4.4		Meningkatnya partisipasi masyarakat guna peningkatan keterampilan dan kualitas diri.	Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan MTQ di Tingkat Kecamatan		120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	120 Orang	
8.4.5			Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Festival Seni Qasidah/Nasyid di Tingkat Kecamatan		200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	
8.4.6			Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Pesparawi di Tingkat Kecamatan		330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	330 Orang	
8.4.7			Frekuensi Pelaksanaan Gotong royong		48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	48 kali	
8.4.8			Frekuensi Pelaksanaan Senam Sehat bersama masyarakat		6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	Kecamatan Sibolga Selatan
8.4.9			Pameran Pembangunan dalam Rangka Hari Jadi Sibolga		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
8.4.10			Frekuensi Pameran dalam Rangka Perayaan HUT RI		1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	1 kali	
8.4.11			Jumlah peserta pada pelaksanaan porkot		450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	450 Orang	
8.4.12			Jumlah balita kemas/Posyandu dan Lansia yang menerima makanan tambahan		46 posyandu	46 posyandu	46 posyandu	46 posyandu	46 posyandu	46 posyandu	Kecamatan Sibolga Selatan
8.4.13		Meningkatnya koordinasi antara Pemerintah	Frekuensi pelaksanaan Musrenbang di Ke c. Sibolga Selatan		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	



No	Urusan	Sasaran OPD	Uraian Indikator OPD	Kondisi Awal 2020	Target Tahun						OPD Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
8.4.14		dengan masyarakat	Monitoring Tim delegasi Kecamatan pada penilaian kelurahan terbaik dan Kelurahan Percontohan		3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
8.4.15			Koordinasi ketentraman dan ketertiban dengan instansi vertikal di Wilayah Kecamatan		4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	
<b>Pemerintahan Umum</b>											
<b>9 Kesatuan Bangsa dan Poilitik</b>											
9.1		meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang wawasan kebangsaan	persentase pertumbuhan pembinaan dan pengembangan wawasan kebangsaan		70	72	74	76	78	80	Kesbangpol
9.2		kebangsaan ,ideologi dan pembauran kebangsaan serta kehidupan	persentase jumlah konflik yang telah ditangani dan keseluruhan konflik sosial yang terjadi		72	74	76	78	80	82	
9.3		berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	persentase pertumbuhan pembinaan politik		74	76	78	80	82	84	

Sumber: Data diolah



**Tabel 8.9**  
**Indikator Kinerja Program Kota Sibolga**  
**Tahun 2021-2026**

No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>A</b>	<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>									
1	Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Kegiatan	4	4	4	4	4	4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
2	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	3,5	0,042	4,9	5,6	6,3	7,0	
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persen	90	92	95	97	98	100	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persen	35	40	45	50	55	60	
	Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	RSU FL TOBING SIBOLGA
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meter	0	5645	5701	5758	5816	5874	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persen	67,90	73,41	78,83	84,25	89,67	95,09	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persen	65	68	75	80	85	90	
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persen	4,74	5,09	5,45	5,81	6,16	6,52	
		Program Penataan Bangunan Gedung	Persen	53,13	54,01	54,88	56,15	57,42	58,69	
		Program Penyelenggaraan Jalan	Km	43,23	45,39	47,63	49,88	51,00	53,24	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Kegiatan	1	2	3	3	3	3	
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Kawasan Permukiman	Persen	73	74	75	76	77	78	
		Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persen	80	80	80	80	80	80	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persen	70	77	80	85	87	90	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persen	20	30	40	60	80	100	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Persen	20	30	40	60	80	100	
		Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persen	20	30	40	60	80	100	
		Program Penanganan Bencana	Persen	60	70	80	80	90	100	
		Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persen	20	50	60	70	80	100	
<b>B</b>	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>									
7	Tenaga Kerja	Program Hubungan Industrial	Persen	80	80	80	80	80	80	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan
		Program Penempatan Kerja	Persen	40	45	50	60	70	80	
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	70	70	75	75	80	80	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Perempuan	keg	1	1	1	1	1	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan





No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Perlindungan Khusus Anak	keg	1	1	1	1	1	1	Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Pangan	Program Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Kali	52	55	55	55	55	55	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Unit	1	1	1	1	1	1	
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Kali		40	40	40	40	40	
10	Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	ada/ tidak	Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Pengendalian Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks	1,0≤IP≤5,0	1,0≤IP≤5,0	1,0≤IP≤5,0	1,0≤IP≤5,0	1,0≤IP≤5,0	1,0≤IP≤5,0	
		Udara	Indeks	91,63	91,73	91,83	91,93	92,03	92,13	
		Tutupan Lahan	Indeks	45,4	46	46,5	47	47,5	48	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (KEHATI)	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Kegiatan			1	1	1	1	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	ada/ tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	
		Program Pengelolaan Persampahan	Persen	75	80	85	90	95	100	
11	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Program Pendaftaran Penduduk	Persen	71,14	73,57	74,57	75,42	77	77,85	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Program Pencatatan Sipil	Persen	87,64	88,71	89,55	90,57	91,48	92,57	
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	75,7	80	87,14	91,4	95,7	100	
12	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Program Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat Hukum Adat	lembaga	6	6	6	6	6	6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk	Kegiatan	20	30	40	50	60	70	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kegiatan	20	30	40	50	60	70	
		Pembinaan Keluarga Sejahtera	Kegiatan	20	30	40	50	60	70	
14	Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
15	Komunikasi dan Informatika	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persen	80	91	95	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Aplikasi	4	5	5	6	7	7	
16	Koperasi Usaha Kecil Menengah	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persen	72	72,72	73,45	74,18	74,92	75,67	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persen	72	72,72	73,45	74,18	74,92	75,67	
		Program Pengembangan UMKM	Persen	99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	buah	5	5	5	5	5	5	
17	Penanaman Modal	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12 bulan	85	86	87	88	88	89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
		Program Promosi Penanaman Modal	12 bulan	87	88	89	90	91	91	
		Program Pelayanan Penanaman modal	12 bulan	87	88	89	90	91	91	
		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12 bulan	85	86	87	88	88	89	
		Program Pengelolaan data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	12 bulan	88	89	90	91	92	92	
18	Kepemudaan dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persen	65,00	65,65	66,31	66,97	67,64	68,32	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
			Persen	10,00	10,10	10,20	10,30	10,41	10,51	
		Program Pengembangan Organisasi Kapasitas Kepramukaan	persen	65,00	65,65	66,31	66,97	67,64	68,32	
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Medali	1	5	6	8	8	8	
19	Statistik	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persen		17	23	33	43	50	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
		Program Pembinaan Sejarah	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Sub Kegiatan	5	5	5	5	5	5	
		Program Pengelolaan Permuseuman	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	
22	Perpustakaan	Program Pembinaan Perpustakaan	Orang	20.000	22.000	24.000	26.000	27.000	28.000	Dinas Perpustakaan
		Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	buah	2	3	3	4	4	5	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
23	Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Arsip Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	- 50 Arsip - 3 Orang	
		Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	- 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip - 50 Arsip	
<b>C</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>									
24	Kelautan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Unit	933	950	950	975	975	975	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Unit / Ekor	7 / 13.150	7 / 13.500	7 / 13.500	8 / 14.000	8 / 14.000	8 / 14.000	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kali	104	110	120	125	130	130	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
25	Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	objek		10	10	10	10	10	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Program Pemasaran Pariwisata	Persen	3	3	3	3	3	3	
		Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	orang	27	30	33	36	39	42	
26	Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan masyarakat Veteriner	Ekor	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Program Penyuluhan Pertanian	Kali		40	46	50	50	50	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Surat		10	10	10	10	10	
27	KEHUTANAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PERDAGANGAN	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persen	100	100	100	100	100	100	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persen	14,10	15,51	17,07	18,77	20,65	22,72	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pasar	2	2	2	2	2	2	
		Program Pengembangan Ekspor	Kegiatan			1	1	1	1	
		Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Kali	-	2	2	2	2	2	
30	Perindustrian	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persen	53	55	60	65	70	75	
		Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Potensial	IKM			20	20	20	20	



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
31	<del>TRANSMIGRASI</del>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>D</b>	<b>Urusan Penunjang</b>									
32	Administrasi Pemerintahan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Persen	100	100	100	100	100	100	Setdakot – Administrasi Pembangunan, Umum, Organisasi, Hukum
		Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	3	3	3	3	3	3	
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
			Persen	100	100	100	100	100	100	
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persen	100	100	100	100	100	100	
dokumen	11		12	12	12	12	12			
33	Perencanaan	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	90%	90%	90%	90%	90%	90%	
34	Keuangan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelolaan



No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	
35	Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian Daerah
		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persen	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	
36	Penelitian dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	85	87	88	90	92	94	Inspektorat
		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persen	85	87	88	90	92	94	
38	Kewilayahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	80%	80%	81%	82%	83%	84%	Kecamatan Sibolga Utara
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	80%	80%	81%	82%	83%	84%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	orang	680	680	680	680	680	680	Kecamatan Sibolga Kota
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kali	3	3	3	3	3	3	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persen	75%	75%	80%	85%	90%	95%	





No	Urusan	Program	Satuan	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	OPD Penanggung jawab
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	75%	75%	80%	85%	90%	95%	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kali	3	3	3	3	3	3	Kecamatan Sibolga Selatan
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
39	Pemerintahan Umum	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persen	100	100	100	100	100	100	
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persen	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Program Prioritas Pembangunan	117		111	115	117	117	117	117	

Sumber: Data diolah.

